

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Dampak pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi.

Dalam pembangunan ekonomi akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran suatu negara.

Sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan investasi pembangunan diperlukan berbagai infrastruktur. Antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan

telekomunikasi, air bersih, dsb. Dorongan peningkatan pada subsektor listrik, subsektor jalan, subsektor transportasi dan subsektor komunikasi tersebut disebabkan karena tingkat permintaan dari subsektor tersebut terus mengalami peningkatan. Disamping itu, respon permintaan yang terus meningkat terhadap subsektor-subsektor tersebut diimbangi dengan banyaknya investasi pembangunan infrastruktur di subsektor-subsektor tersebut.

Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, seperti waduk dan bendungan sangat di butuhkan pada saat ini dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional ketahanan pangan merupakan dasar bagi ketahanan ekonomi. Untuk dapat melaksanakan pembangunan dengan baik, Ketahanan pangan haruslah di wujudkan terlebih dahulu. Sambrani (2014) menyebutkan bahwa ketersediaan infrastuktur yang berkualitas merupakan sebuah keharusan agar pembangunan ekonomi yang cepat dapat tercapai serta membutuhkan investasi terus menerus.

Pada praktiknya, pemerintah saat ini yakni kementrian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat sedang melakukan program pembangunan 49 bendungan yang di rencanakan pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Dan salah satu bendungan yang telah rampung pengerjaannya yaitu bendungan Jatigede. Bendungan jatigede merupakan bendungan yang berada di Kabupaten Sumedang, pembangunan bendungan ini telah di rencanakan sejak tahun 1963. Bendungan ini dibangun dengan membendung aliran sungai cimanuk di wilayah Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Lokasi bendungan Jatigede terletak di

Kampung Jatigede Kulon Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Dan lahan yang tegenang seluas 4.891,13 hektar yang meliputi 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Wado, Darmaraja, Cisitu, Jatinunggal dan Kecamatan Jatigede atau 26 (dua puluh enam) Desa (Nureni, 2011).

Manfaat dari bendungan jatigede yaitu untuk pengendalian banjir dan pengelolaan irigasi seluas 90.000 hektar guna meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, mengurangi resiko banjir di daerah hilir, perikanan terapung, sebagai destinasi wisata baru, sekaligus penyedia air baku dan pembangkit listrik tenaga air 110 MW. Maka dari itu infrastruktur jaringan listrik merupakan komponen penting dalam menunjang aktivitas masyarakat dan juga sangat berpengaruh terhadap masalah perekonomian. Adapun manfaat pembangkit listrik tenaga air yaitu; respon pembangkit listrik yang cepat dalam menyesuaikan kebutuhan beban sehingga paembangkit listrik mudah digunakan untuk kondisi beban puncak maupun saat terjadi gangguan d jaringan, selain itu manfaat adanya pembangkit listrik juga sekaligus digunakan untuk kegiatan lain seperti irigasi atau cadangan air dan pariwisata, PLTA juga memiliki manfaat sebagai pembangkit listrik dengan memiliki relative umur yang pannung yaitu 50-100 tahun. Adanya bendungan Jatigede mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekitar sehingga mampu menyediakan lapangan kerja sector informal.

Sektor informal berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional, karena ketika program pembangunan kurang mampu

menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dapat berperan sebagai alternatif peluang kerja bagi para pekerja yang tidak terserap di sektor formal (Damayanti, 2011).

Peranan sektor informal semakin membesar, setelah terjadinya beberapa krisis ekonomi di Indonesia. Dalam kondisi ini, sektor informal menjadi alternatif bagi pekerja agar tetap mempunyai penghasilan. Secara umum sektor informal memberikan *return* yang relatif kecil, tetapi sektor informal tetap menjadi pilihan tenaga kerja sebagai penopang pemenuhan kebutuhan hidup pekerja bersama keluarganya.

Secara umum, sektor informal dapat diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Istilah sektor informal semakin berkembang dan banyak didefinisikan oleh para ahli. *International Labour Organisation* (ILO) mendefinisikan sektor informal adalah sektor yang mudah dimasuki oleh pengusaha pendatang baru, menggunakan sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya dan teknologi yang disesuaikan, keterampilan yang dibutuhkan diperoleh di luar bangku sekolah, tidak diatur oleh pemerintah dan bergerak pada pasar penuh persaingan (Heriyanto, 2012).

Banyaknya bidang sektor informal yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi salah satu bidang usaha yang dapat menghasilkan pendapatan, serta dapat menyerap tenaga kerja. Usaha berdagang merupakan salah satu alternatif lapangan

kerja informal yang banyak menyerap tenaga kerja. Salah satunya adalah pedagang kaki lima (PKL) (Priyandika, 2015).

Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang dengan modal relatif kecil dan berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, dan usaha tersebut biasanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis (Hariningsih dkk, 2008). PKL juga menguntungkan bagi konsumen dari masyarakat ekonomi menengah kebawah, karena PKL mampu menyediakan barang-barang kebutuhan dengan harga yang relatif murah. Sektor informal yang berkembang di Kabupaten Sumedang salah satunya adalah sektor perdagangan. Untuk menggambarkan keadaan perekonomian di Kabupaten Sumedang, dapat dilihat pada statistik distribusi PDRB.

Tabel 1.1 Distribusi PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014-2016

Kategori	Uraian	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21,70	20,65	20,35
2	Pertambangan dan penggalian	0,11	0,11	0,10
3	Industri Pengolahan	18,88	18,49	18,63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,31	0,32	0,36
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03
6	Konstruksi	9,30	10,16	10,08
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,08	16,45	16,07
8	Transportasi dan Pergudangan	4,72	5,25	5,33
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,38	4,31	4,48

10	Informasi dan Komunikasi	2,77	2,91	3,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,07	4,14	4,36
12	Real Estate	1,59	1,61	1,57
13	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,81	6,84	6,65
15	Jasa Pendidikan	5,56	5,92	6,04
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,08	1,10
17	Jasa Lainnya	1,61	1,67	1,72
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan data PDRB diatas yang di keluarkan oleh BPS. Sector yang berkontribusi tertinggi yaitu sector pertanian yaitu sebesar 20,35%, di ikuti oleh sector industri pengelolaan yaitu sebesar 18,63% sedangkan sector perdagangan besar dan eceran sebesar 16,07 % yang dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Sumedang berkontribusi terbesar ketiga setelah pertanian dan industri pengolahan. Melihat kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai salah satu penyumbang terbesar ketiga, diharapkan sektor perdagangan dapat membantu dalam menyediakan lapangan pekerjaan untuk Kabupaten Sumedang. Perdagangan di kabupaten sumedang sangat berpotensi, karena sejalan dengan adanya Bendungan Jatigede yang berperan penting dalam aktivitas perdagangan masyarakat sekitar terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang menjadi objek terkena dampak (OTD).

Pedagang Kaki Lima di sekitaran bendungan jatigede meningkat sejalan dengan dibukanya bendungan jatigede. Dikarenakan banyaknya pengunjung lokal maupun luar daerah yang berkunjung ke daerah tersebut, sehingga mengakibatkan masyarakat yang terkena dampak (OTD) beralih menjadi pedagang di daerah tersebut. Dalam suatu perekonomian, setiap aktivitas mempunyai keterkaitan dengan aktivitas lainnya.

PKL bagian dari sektor informal yang terlihat banyak di kota-kota negara berkembang seperti Indonesia. Banyak peneliti yang berpendapat bahwa sektor informal seperti PKL timbul dari keadaan sosial ekonomi negara berkembang. Oleh karena itu kegiatan sektor informal tidak dapat ditiadakan dengan tanpa merusak sistem ekonomi negara berkembang secara keseluruhan (Sumarsono),

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah pedagang kaki lima dari tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Jatigede, Kecamatan Darmaraja Dan Kecamatan Cisititu yang terkena dampak dari dibukanya Bendungan Jatigede di Kabupaten Sumedang.

Tabel 1.2

Jumlah Pedagang Kaki Lima dari 3(tiga) Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah
1	Jatigede	42
2	Darmaraja	39
3	Cisititu	32
Total		113

Sumber : Prapenelitian

Dari table 1.2 diatas Pedagang kaki lima di Kecamatan Jatigede lebih dominan dibandingkan Kecamatan Cisu dan Darmaraja. Karena disana merupakan pusat bendungan tersebut yang menyebabkan para pengunjung banyak berkunjung ke daerah tersebut. Sehingga para pedagang kaki lima banyak berjualan disana.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima, antara lain modal, lama usaha, jam kerja, dan tenaga kerja. Modal merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala utama berdirinya usaha kecil. Modal dalam suatu usaha dapat berupa modal sendiri atau modal pinjaman. Hasil penelitian Wicaksono (2011) mengatakan, faktor modal seringkali memberikan pengaruh yang besar terhadap suatu usaha dagang, dimana dapat berdampak pada timbulnya permasalahan lain, seperti modal yang dimiliki seadanya, maka seseorang hanya mampu membuka usaha dagangnya tanpa bisa memaksimalkan skala usahanya.

Faktor yang kedua yaitu lama usaha, lama usaha seperti penelitian yang dilakukan oleh Sunaryanto (2005), mengatakan bahwa lamanya seseorang pedagang menekuni usahanya maka akan meningkat pula penegetahuannya dan akan berpengaruh pada tingkat pendapatannya. Dengan kata lain, semakin lama seorang pelaku bisnis menekuni bidang usaha perdagangan maka akan semakin meningkat pula pengetahuan mengenai perilaku konsumen dan perilaku pasar. Keterampilan berdagang semakin bertambah maka semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil dijaring.

Menurut hasil penelitian Wicaksono (2011) mengatakan, faktor jam kerja didalam suatu usaha memiliki hubungan langsung dengan pendapatan, dimana setiap penambahan waktu operasional yang dipengaruhi jumlah hasil produksi, akan semakin membuka peluang bagi bertambahnya pendapatan dari hasil penjualan.

Faktor tenaga kerja merupakan faktor yang penting dalam kegiatan produksi karena pekerja inilah yang mengalokasikan dan memanfaatkan faktor – faktor lain guna menghasilkan suatu output yang bermanfaat. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Soetomo (1990).

Keberadaan Bendungan Jatigede ini tentunya memiliki dampak tersendiri bagi wilayah sekitar baik kepada pedagang, pengunjung, pemerintah dan terlebih luasnya masyarakat Indonesia. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengulas judul tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di sekitar Bendungan Jatigede Kabupaten Sumedang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam analisis ini yaitu :

- a. Bagaimana karakteristik pedagang kaki lima di sekitar Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang ?

- b. Bagaimana pengaruh modal usaha, lama usaha, jam kerja dan tenaga kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Bendungan Jatigede Kabupaten Sumedang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari analisis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui karakteristik pedagang kaki lima di sekitar Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang ?
- b. Untuk mengetahui pengaruh modal usaha, lama usaha, jam kerja dan tenaga kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima di sekitar Bendungan Jatigede di Kabupaten Sumedang ?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademik

Searah dengan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa tambahan sumber informasi untuk pengembangan ilmu ekonomi mikro mengenai pendapatan, dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya khususnya mengenai Analisis factor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di sekitar Bendungan Jatigede Kabupaten Sumedang..

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Selain kegunaan teoritis di atas, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan kegunaan praktis atau empiris berupa :

1. Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima.
2. Sebagai tambahan bahan referensi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.